



UNITED NATIONS
INDONESIA



NEWSLETTER

2022 | EDISI 5

SDG of the Month

8 PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI



© UNICEF/2022/UN0630091

KISAH

**Kelompok Tanggap Krisis Global
Perserikatan Bangsa-Bangsa**

**Tindakan Mendesak untuk Mengatasi Dampak
Berat COVID-19 terhadap Pembelajaran Anak**

**Efek Gender yang Masih Ada dari Pandemi
COVID-19 di Asia dan Pasifik**

KEGIATAN

Hari Kependudukan Dunia



CATATAN DARI KEPALA PERWAKILAN PBB DI INDONESIA



Valerie Julliard
Kepala Perwakilan PBB
di Indonesia

Pembaca yang budiman,

Selamat datang di edisi terbaru kami.

Dunia kita menghadapi tantangan berlapis-lapis: perubahan iklim, COVID-19, konflik yang kompleks, dan inflasi yang meningkat. Kami telah melihat kasus COVID-19 berlipat ganda di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan perang di Ukraina yang mengganggu ketahanan pangan dan inflasi yang meroket.

Secara global, ada cukup makanan, energi, dan keuangan bagi setiap negara untuk melewati krisis yang saling terkait yang diciptakan oleh perang ini. Namun, ketidaksetaraan yang mendalam dan masalah distribusi dan logistik menyebabkan jutaan orang menderita tanpa perlu.

Memecahkan krisis ini membutuhkan tindakan terkoordinasi di seluruh bidang. Pada 22 Juli, PBB membantu mendorong kesepakatan Ukraina dan Rusia untuk melanjutkan ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam yang oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres disebut sebagai "suara harapan" di dunia yang sangat membutuhkannya. Awal tahun ini, Sekretaris Jenderal membentuk kelompok juara yang terdiri dari enam pemimpin dunia terkemuka –

termasuk Presiden Joko Widodo – sebagai bagian dari Global Crisis Response Group (GCRG) untuk tindakan segera guna mencegah krisis yang membayangi. Para pemimpin ini ditugaskan untuk memajukan konsensus global tentang langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi krisis.

Edisi buletin minggu ini berisi profil GCRG dan empat bidang tindakan mendesaknya. Ada juga sorotan dari badan-badan PBB dalam upaya Indonesia untuk mempercepat pemulihan dari COVID-19. Misalnya, UNICEF menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis pembelajaran saat anak-anak Indonesia kembali ke sekolah. Sementara itu, ILO bergabung dengan industri perhotelan untuk mengarusutamakan layanan penilaian risiko COVID-19. Ini akan membantu bisnis termasuk hotel untuk menerapkan rencana aksi yang meminimalkan risiko penularan virus di tempat kerja.

Saya berharap kisah yang disorot dalam edisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja sama dan memberdayakan mereka yang menghadapi risiko krisis ini tanpa meninggalkan siapa pun.

Terima kasih.

Valerie

Iklm dan Ekonomi

Perubahan iklim yang tidak tanggung-tanggung akan menimbulkan biaya ekonomi yang cukup besar.

Biaya ekonomi untuk tidak melakukan apa pun tentang perubahan iklim antropogenik jauh lebih besar daripada biaya untuk membatasinya melalui tindakan mitigasi.

Kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama beberapa dekade terakhir sekarang berisiko karena perubahan iklim.

Meskipun rentan terhadap perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi juga merupakan pendorong utama perubahan iklim.

Pemisahan emisi gas rumah kaca dari pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk keberhasilan memerangi perubahan iklim. Jalur pembangunan hijau yang merangkul pertumbuhan hijau, ekonomi sirkular, dan teknologi bersih baru sangat penting untuk mencapai target pengurangan emisi.

Pergeseran ke ekonomi rendah karbon tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi tetapi juga harus memenuhi permintaan pekerjaan yang layak bagi kaum muda untuk mengembangkan industri dan pasar baru.

Diambil dari seri literasi ilmu iklim yang disiapkan oleh UNESCAP. Sumber: <https://bangkok.unesco.org/content/climate-science-literacy-asia-pacific>



TAHUKAH KAMU?

Pada laju yang ada saat ini, ekonomi dunia akan kehilangan hampir 20% dari PDB dari perubahan iklim.

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



CLIMATE SCIENCE LITERACY
IN SUPPORT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

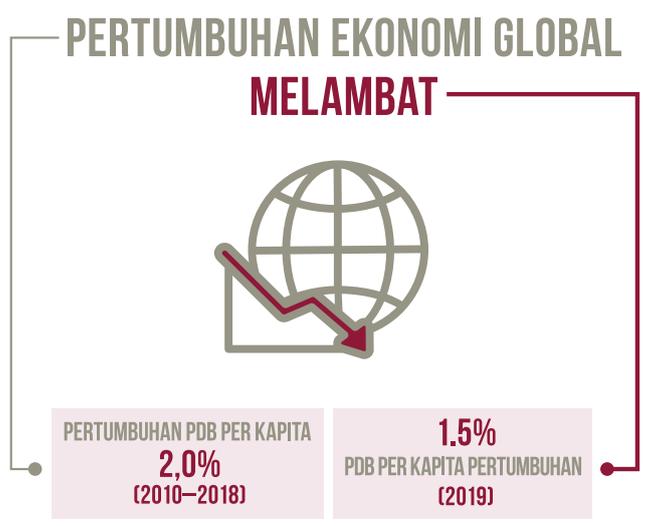
Sustainable Development Goal of the Month

8 PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



MEMPROMOSIKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, PEKERJAAN PENUH DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

SEBELUM COVID-19



SELAMA PANDEMI 1,6 MILIAR PEKERJA DALAM EKONOMI INFORMAL RISIKO KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN

IMPLIKASI COVID-19



PARIWISATA MENGHADAPI TANTANGAN YANG BELUM PERNAH DIPAHAMI




COVID-19 DAPAT MENYEBABKAN KEHILANGAN SEBANYAK 400 JUTA KERJA DI KUARTAL KEDUA 2020



ACCESS MORE DATA AND INFORMATION ON THE INDICATORS AT [HTTPS://UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2020/](https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/)

Kelompok Tanggap Krisis Global PBB tentang Pangan, Energi, dan Keuangan

Perang di Ukraina telah menyebabkan krisis biaya hidup. Diperkirakan 1,6 miliar orang terkena setidaknya satu dimensi krisis. Sekitar 1,2 miliar dari mereka tinggal di negara-negara 'badai sempurna' yang sangat rentan terhadap ketiga dimensi – pangan, energi, dan keuangan.



“Bagi orang-orang di seluruh dunia, perang [di Ukraina], bersama dengan krisis lainnya, mengancam akan melepaskan gelombang kelaparan dan kemelaratan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meninggalkan kekacauan sosial dan ekonomi di belakangnya. Tidak ada negara atau komunitas yang tidak akan tersentuh oleh krisis biaya hidup ini.”

– António Guterres, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa

Global Crisis Response Group (GCRG) akan membantu para pengambil keputusan untuk memobilisasi solusi dan mengembangkan strategi untuk membantu negara-negara mengatasi krisis yang saling terkait dengan pangan, energi dan keuangan.

Isu-isu

Lingkaran buruk: Harga pangan dan bahan bakar, serta pengetatan keuangan dapat memiliki efek penting pada mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat memberi makan satu sama lain, menciptakan lingkaran setan kemiskinan, kelaparan dan ketidaksetaraan. Bencana ini telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi sejak perang di Ukraina menjadi tak tertahankan bagi banyak negara.



Kepala GCRG

Sekretaris-Jenderal PBB, António Guterres, memberikan kepemimpinan dan koordinasi politik tingkat tinggi bersama dengan para Kepala Negara/ Pemerintah juara untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan konsensus global tentang tindakan untuk mencegah dan menanggapi dampak

Lingkaran buruk sedang muncul



Pangan

Harga pangan masih mendekati rekor tertinggi, dengan banyak petani tidak mampu meningkatkan produksi karena harga pupuk semakin tinggi. Saat ini, dunia menghadapi krisis akses, di mana ada cukup segalanya tetapi dengan harga yang salah, tempat yang salah, dan waktu yang salah. Besok, dunia mungkin menghadapi krisis ketersediaan, di mana pasokan penting tiba terlambat atau dalam jumlah terlalu sedikit, meskipun harga tinggi.

Energi

Harga energi terus naik ke level rekor per barel. Ini menghasilkan backout dan antrian bahan bakar di seluruh belahan dunia. Konflik yang berkepanjangan akan menyebabkan harga energi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Namun, untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan energi, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan investasi energi terbarukan secara signifikan di seluruh teknologi seperti surya, angin, dan hidrogen.

Keuangan

Saat ini, diperkirakan 60 persen tenaga kerja dunia memiliki pendapatan riil yang lebih rendah daripada sebelum pandemi. Mayoritas negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi. Lebih banyak yang harus dilakukan untuk membawa stabilitas ke pasar global, mengurangi volatilitas dan mengatasi ketidakpastian harga komoditas dan meningkatnya biaya utang.

Pemimpin Dunia di GCRG

Enam pemimpin dunia terkemuka akan memperjuangkan dan mendukung seruan Sekretaris Jenderal untuk tindakan segera untuk mencegah krisis yang membayangi. Sebagai Juara Grup, mereka akan mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global tentang tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi krisis.



Sheikh Hasina
Perdana Menteri
Bangladesh



Mia Mottley
Perdana Menteri
Barbados



Mette Frederiksen
Perdana Menteri
Denmark



Mette Frederiksen
Kanselir
Jerman



Joko Widodo
Presiden
Indonesia

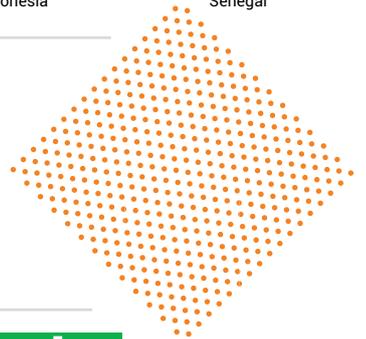


Macky Sall
Presiden
Senegal



Komite Pengarah GCRG

Wakil Sekretaris-Jenderal PBB, Amina J. Mohammed, memimpin Komite Pengarah GCRG. Dia akan memanfaatkan kekuatan pertemuan penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan kepemimpinan di tingkat tertinggi serta mengakses data terbaru.



Tim Tugas GCRG

Di dalam Grup, tiga alur kerja tentang Pangan, Energi, dan Keuangan akan mengumpulkan data dan menghasilkan analisis, rekomendasi kebijakan, dan solusi untuk mendukung pengambilan keputusan dan advokasi untuk pertimbangan Komite Pengarah. Kelompok alur kerja ini akan tetap fleksibel dan responsif terhadap peluang yang berupaya menyelesaikan krisis langsung dan kerentanan orang dan negara.

Kelompok Alur Kerja	Ketua Bersama	
Keuangan	 Rebeca Grynspan Sekretaris Jenderal Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD)	 Vera Songwe Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi untuk Afrika
Pangan	 Inger Andersen Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP)	 David Nabarro Direktur Strategis, Sistem Keterampilan dan Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Energi	 Rachel Kyte Dekan Fletcher School Tufts University	 Damilola Ogunbiyi Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Energi Berkelanjutan untuk Semua

Prioritas Komite Pengarah



Koordinasi

Krisis ini sangat terkait. Risikonya adalah pendekatan sedikit demi sedikit akan menyelesaikan satu masalah tetapi memperburuk masalah lainnya. Penting untuk memiliki rekomendasi yang dibuat bersama yang menyelaraskan pemangku kepentingan di sekitar solusi.

Koherensi harus menjadi inti pekerjaan kita, jadi kita harus sepenuhnya transparan dan berbagi informasi. Alat digital yang tersedia juga akan terbuka untuk penggunaan bersama.



Tindakan mendesak

Solusi yang diusulkan harus siap diimplementasikan. Misalnya, kami membutuhkan proposal segera untuk mengatasi pembatasan baru di wilayah udara Rusia dan transportasi jalan untuk mencegah krisis rantai pasokan lebih lanjut.



Data dan analisis

Manfaatkan sepenuhnya kapasitas data baik di dalam maupun di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari tim Negara PBB hingga laboratorium data di departemen dan lembaga, UN Global Pulse dan tentu saja, peran mendasar dari Lembaga Keuangan Internasional. Dalam situasi yang berkembang pesat ini, proposal harus didasarkan pada bukti dan diinformasikan oleh data dan analisis terkini.



Kemitraan

Global Crisis Response Group dan Komite Pengarah harus mampu membuat semua aktor berkumpul untuk mencari solusi – mulai dari Negara Anggota dan sistem PBB hingga lembaga keuangan internasional, organisasi regional, kelompok negara, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra komunikasi.

Layanan Penilaian Risiko COVID-19 untuk Keberlanjutan Bisnis di Industri Perhotelan



© ILO Indonesia

Industri perhotelan mengalami lonjakan wisatawan setelah jeda dua tahun yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 karena pembatasan perjalanan dan masalah keselamatan dan kesehatan wisatawan. 120 hotel di seluruh Indonesia mendaftar untuk layanan penilaian risiko COVID-19 yang disediakan secara gratis oleh ILO. Layanan ini dikembangkan oleh [Proyek ILO dalam Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja](#) untuk membantu bisnis Indonesia menerapkan rencana aksi untuk meminimalkan risiko penularan virus di tempat kerja dan memperkuat sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mereka dan memastikan kelangsungan bisnis.

Layanan penilaian risiko juga meningkatkan kepercayaan bisnis untuk beroperasi dengan aman dan mempertahankan produktivitas mereka sambil juga mencocokkan kesan karyawan dan pelanggan mereka tentang pengaruh COVID-19 untuk memastikan bahwa

mereka terlindungi serta program keselamatan dan kesehatan dipromosikan di lokasi. Misalnya, hotel yang berpartisipasi dapat mengembangkan rencana aksi berdasarkan penilaian dan survei karyawan dalam waktu lima minggu dan mengadopsi sistem tanpa sentuhan seperti kode QR dan menu digital untuk memprioritaskan keselamatan pekerja dan tamu.

Untuk membantu industri hotel dan restoran yang terkena dampak parah dari pandemi, ILO telah bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mempromosikan penerapan layanan tersebut. Kemitraan ini juga telah mendorong hotel yang berpartisipasi untuk meningkatkan fasilitas mereka untuk lebih mempromosikan prinsip-prinsip K3.

[Selengkapnya tentang layanan penilaian risiko ILO untuk industri perhotelan di sini.](#)

Menjelajahi Masa Depan UMKM di Indonesia Melalui Peninjauan ke Masa Depan yang Strategis

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia – dan penggerak pertumbuhan ekonomi masa depan dengan lebih dari 64 juta usaha. Seperti apa lanskap UMKM di Indonesia ke depan? Apa isu-isu kunci yang muncul untuk sektor ini? Apa yang berpotensi mengubah atau mengganggu masa depan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kantor UN Global Pulse kami di Indonesia dan Finlandia memulai proyek tinjauan ke depan strategis yang menarik bekerja sama dengan Pusat Data & Informasi dan Direktorat Pengembangan Koperasi & UKM di Bappenas: pemindaian cakrawala tentang masa depan UMKM di Indonesia.

Pandangan ke depan yang strategis – bersama dengan data, digital, inovasi, dan ilmu perilaku – adalah serangkaian strategi lintas sektoral, yang juga dikenal sebagai 'kuintet perubahan', yang diusulkan dalam [Agenda Bersama Kita \(Our Common Agenda\)](#). Melalui Agenda Bersama Kita, PBB mendukung perubahan menyeluruh dalam cara kebijakan dikembangkan, membantu memastikan bahwa pandangan ke depan strategis dimanfaatkan sebagai bagian integral dari semua upaya pembuatan kebijakan. Pandangan ke depan yang strategis membantu kita untuk menavigasi di dunia yang secara fundamental kompleks dan tidak pasti dan mendorong kemampuan kita untuk membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang dapat kita bentuk dan pengaruhi alih-alih sesuatu yang sudah diputuskan.

Di masa perubahan yang cepat dan berbagai krisis – seperti pandemi COVID-19, konflik Ukraina, dan krisis iklim – tata



kelola yang bertanggung jawab memerlukan persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini sedang mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia (2025–2045), diperlukan pendekatan yang lebih antisipatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat menanggapi kekhawatiran jangka panjang terhadap masa depan yang tidak terduga.

[Baca lebih lanjut di sini.](#)



Tindakan Mendesak untuk Mengatasi Dampak Berat COVID-19 terhadap Pembelajaran Anak



©UNICEF/2022/JND0630091

Lebih dari dua tahun semenjak pandemi COVID-19 dimulai, murid dan guru di Indonesia serta di seluruh dunia berjuang mengatasi krisis pembelajaran yang masif. Menurut laporan bulan Juni 2022 dari UNICEF, UNESCO, Bank Dunia, dan lembaga lain, diperkirakan 70 persen anak di dunia berusia 10 tahun tidak dapat memahami teks sederhana. Angka ini naik dari 57 persen sebelum pandemi.

UNICEF mendukung upaya-upaya yang diambil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan kementerian lain yang terkait untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Antara lain, dengan mendukung guru-guru PAUD yang membantu murid mengatasi ketertinggalan, dengan fokus pada kemampuan literasi dan berhitung, melalui inisiatif seperti program Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD HI) yang dilaksanakan di tiga provinsi di kawasan timur Indonesia, serta membantu para guru kelas awal jenjang pendidikan dasar meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajarkan kemampuan literasi dan berhitung. Selain itu, UNICEF mendukung upaya pemanfaatan teknologi digital untuk membangun keterampilan abad ke-21 di kalangan remaja.

[Ketahui lebih lanjut di sini.](#)

Untuk memastikan agar setiap anak di Indonesia bisa membaca pada usia 10 tahun, UNICEF menyerukan tindakan yang diakselerasi dengan kerangka RAPID:

- R**each (menjangkau) dan mempertahankan setiap anak di sekolah
- A**ssess (menilai) tingkat pembelajaran secara teratur
- P**rioritize (memprioritaskan) pengajaran keterampilan dasar
- I**ncrease (meningkatkan) pembelajaran, dan
- D**evelop (mengembangkan) sistem yang lebih kuat untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan anak sehingga setiap anak siap untuk belajar.



Efek Gender yang Masih Ada pada Pandemi COVID-19 di Asia dan Pasifik



Dua tahun setelah pandemi COVID-19, dampak krisis yang berkepanjangan bersifat multidimensi, bahkan di negara-negara yang penyebarannya tidak luas. Bagi perempuan dan anak perempuan, ketidaksetaraan gender yang ada dan hambatan sosial ekonomi hanya diperburuk.

Untuk menilai konsekuensi gender dari pandemi, UN Women dan Asian Development Bank bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk menggelar Rapid Gender Assessment Surveys di tujuh negara di Asia dan Pasifik, yaitu Indonesia, Kiribati, Pakistan, Papua Nugini, Samoa, Solomon. Kepulauan dan Tonga.

Temuan menyoroti bahwa tingkat vaksinasi COVID-19 berbeda antara perempuan dan laki-laki di sebagian besar negara. Di Indonesia, di mana tingkat vaksinasi tinggi, lebih banyak perempuan daripada laki-laki menyebut ketersediaan yang terbatas sebagai alasan utama yang menahan mereka untuk menerima kursus penuh. Di seluruh negara, alasan menahan laki-laki untuk menerima dosis kedua mereka sebagian besar berkaitan dengan penjadwalan janji temu, kendala waktu, atau lokasi pusat vaksinasi.

Krisis juga telah mendorong lebih banyak perempuan keluar dari pasar tenaga kerja, karena banyak yang harus berhenti dari pekerjaan mereka untuk memenuhi tanggung jawab keluarga. Laporan tersebut mencatat bahwa hal ini mungkin berkontribusi pada melebarnya kesenjangan gender dalam kemiskinan, karena perempuan lebih mungkin kehilangan pendapatan mereka, dan lebih kecil kemungkinannya untuk memilikinya.

Bukti yang disajikan di sini menunjukkan bahwa sementara keadaan darurat kesehatan terus mempengaruhi semua anggota populasi, perempuan dan laki-laki menghadapi hambatan yang berbeda untuk mengakses vaksinasi dan persediaan medis. Data yang diberikan dalam laporan ini bertujuan untuk terus merancang respons krisis dan program pemulihan yang ditargetkan untuk mendukung perempuan dan anak perempuan di seluruh Asia dan Pasifik.

[Akses laporan lengkapnya di sini.](#)



Hari Kependudukan Dunia 2022: Dunia Ditetapkan untuk Mencapai 8 Miliar Orang pada 15 November 2022



Kami telah menempuh perjalanan jauh. Dunia kita dan umat manusia telah membuat begitu banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, lebih banyak orang yang tereduksi dan menikmati kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera dari sebelumnya,”

— Anjali Sen, Perwakilan UNFPA Indonesia, dalam talk show Hari Kependudukan Dunia 2022 bertajuk “Dunia 8 Miliar. Memastikan Hak dan Pilihan untuk Semua Menuju Demografis. Ketahanan” di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.

Populasi global diproyeksikan mencapai 8 miliar pada 15 November 2022, menurut [Prospek Populasi Dunia 2022](#), dirilis pada hari Populasi Dunia pada 11 Juli 2022 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA). Mencapai tonggak sejarah ini merupakan alasan untuk perayaan dan seruan bagi umat manusia untuk menemukan solusi atas tantangan yang kita hadapi.

Tantangan yang dihadapi umat manusia sangat akut: isu-isu yang menentukan generasi seperti perubahan iklim, konflik, dan COVID-19 secara tidak proporsional mempengaruhi mereka yang paling terpinggirkan dan rentan di antara

kita. Terlepas dari tantangan ini, kisah di balik 8 miliar dan bagaimana kita sampai di sini adalah kisah kemenangan.

“Delapan miliar orang di dunia berarti delapan miliar kesempatan bagi penduduk dunia untuk hidup sehat dan sejahtera sesuai dengan hak dan pilihannya,” kata Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng, Deputi Bidang Pengelolaan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam sambutannya. “Semua orang harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” lanjutnya.

[Tonton acaranya di Youtube UNFPA Indonesia.](#)

Calendar Highlights



Juli 2022

Mon Sen	Tue Sel	Wed Rab	Thu Kam	Fri Jum	Sat Sab	Sun Min
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

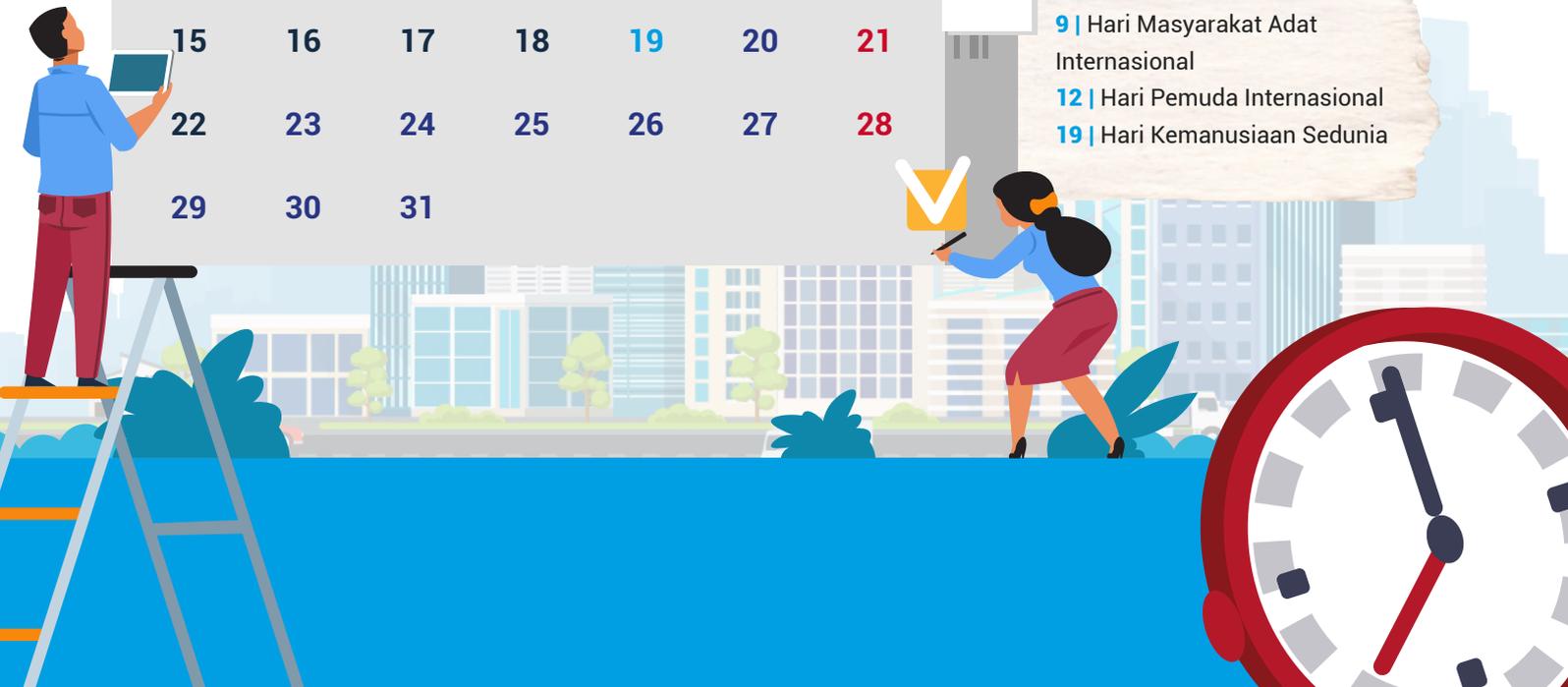
- 5-15 | Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan
- 11 | Hari Populasi Sedunia
- 15 | Hari Keterampilan Pemuda Sedunia
- 18 | Hari Internasional Nelson Mandela



Agustus 2022

Mon Sen	Tue Sel	Wed Rab	Thu Kam	Fri Jum	Sat Sab	Sun Min
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 9 | Hari Masyarakat Adat Internasional
- 12 | Hari Pemuda Internasional
- 19 | Hari Kemanusiaan Sedunia



Tentang Persatuan Bangsa-Bangsa di Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini, PBB terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Tim Negara PBB dipimpin oleh Kepala Perwakilan PBB/*UN Resident Coordinator* (disingkat RC), perwakilan tertinggi dari sistem pembangunan PBB di tingkat negara. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam mengimplementasikan Agenda 2030. Kepala Perwakilan PBB adalah perwakilan yang ditunjuk – dan melapor kepada – Sekretaris Jenderal PBB.

Kirimkan cerita Anda!

Kirim artikel, blog, atau foto-foto ke kami:
unic.jakarta@unic.org



**UNITED
NATIONS
INDONESIA**
.....

-  indonesia.un.org
-  [UN in Indonesia](#)
-  [UN in Indonesia](#)
-  [United Nations in Indonesia](#)

